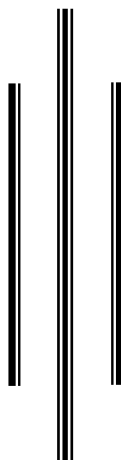




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP )**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2021**



---

---

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN  
TELP. (0271) 495041, FAK.495522

Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>

E-mail : [disdikbud@karanganyarkab.go.id](mailto:disdikbud@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712  
KARANGANYAR

## KATA PENGANTAR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pedoman penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Merujuk pada perpres tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menangani pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2021 ini tidak sekedar memenuhi laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Selain itu juga sebagai bahan pemberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan bahan perbaikan yang berkesinambungan untuk memperbaiki kinerjanya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan terutama di Kabupaten Karanganyar dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2021.

Harapan kami laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa datang bagi seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Februari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar

**Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos.,MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720125 19203 1 004

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Penetapan Kinerja Utama (IKU) .....	7
2.2. Rencana Strategis (Renstra) .....	8
2.3. Perjanjian Kinerja.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
3.2. Realisasi Anggaran.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu faktor strategis untuk mewujudkan daya saing daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan perekonomian daerah dan perkembangan demokrasi karena terkait dengan kecerdasan dan kreatifitas masyarakat. Perlu disadari pula bahwa Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar merupakan bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih besar, yaitu terkait budaya, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan daerah dengan cermat, termasuk perencanaan pembangunan urusan pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sebagai salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

Isu dan permasalahan pendidikan bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab belum meningkatnya mutu pendidikan. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.

Menyadari hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi amanat dan tugas serta tanggungjawab dalam menangani pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati serta juga sebagai panduan untuk menangani isu dan permasalahan tersebut.

Kabupaten Karanganyar telah menetapkan indikator Utama yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. IKU Misi ke Tiga (3) Tujuan (1) Sasarannya Meningkatnya kualitas pendidikan
  - 1) Angka Harapan lama Sekolah
  - 2) Angka Rata-rata lama Sekolah
  
- b. IKU pada Visi ke Lima (5) Tujuan ke (1) Sasarannya Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
  - 1) Persentase kelompok seni budaya yang aktif
  - 2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan
  
- c. IKU pada Visi ke Lima (5) Tujuan ke (1) Sasaran Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas
  - 1) Nilai SAKIP

Dari Indikator Kinerja Utama di atas dalam pencapaiannya perlu didukung indikator Kinerja Kunci, dimana Indikator tersebut untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah yang menjadi tanggungjawab pada Kepala Perangkat Daerah. Sedangkan Indikator Tujuan, Sasaran pada Resntra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang harus dicapai yaitu :

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

Indikator Sasaran:

- 1) Angka partisipasi sekolah
- 2) Angka putus sekolah SD/MI
- 3) Angka putus sekolah SMP/MTs
- 4) Angka melanjutkan
- 5) Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik
- 6) Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik

2. Tujuan : Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan

Sasaran : Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan

Indikator Sasaran

- 1) Persentase kelompok seni budaya yang aktif
- 2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan

3. Tujuan : Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Indikator sasaran:

- 1) Nilai SAKIP
- 2) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut telah tercapai. Untuk melihat sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP).

Laporan kinerja Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai feedback yang berharga dalam memperbaiki kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dimasa mendatang.

## 1.2. Gambaran Umum

## **1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar No. 96 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016); diuraikan bahwa tentang kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

### **a. Kedudukan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### **b. Tugas**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

### **c. Fungsi**

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta Kesekretariatan.
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas kordinator wilayah tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. Struktur Organisasi**

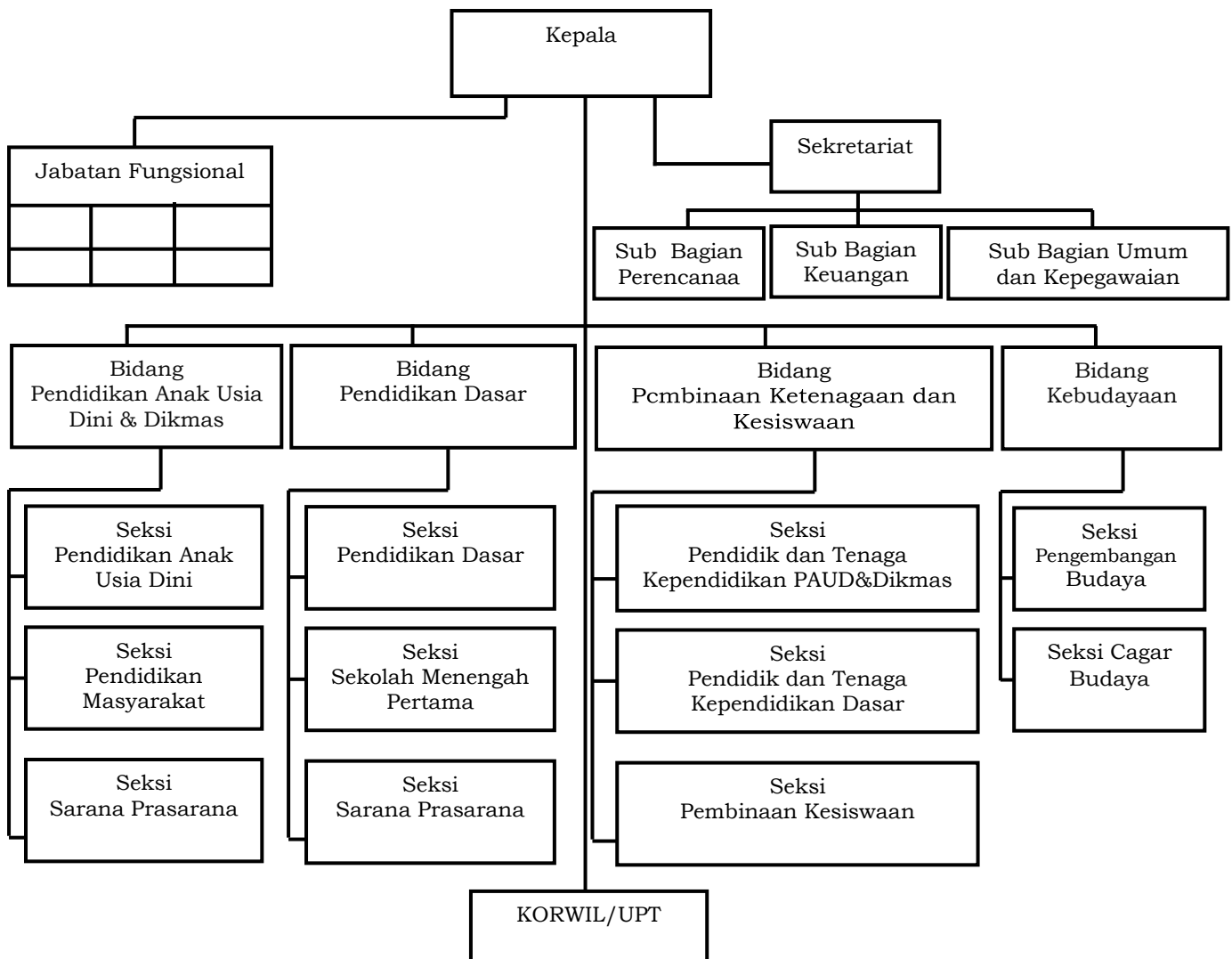
Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 96 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan Tatakerja Dinas Daerah. Struktur Organisasi Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - c. Seksi Sarana Prasarana.
- 4) Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
  - a. Seksi Sekolah Dasar;
  - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama ;
  - c. Seksi Sarana Prasarana;
- 5) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan membawahi :
  - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan;
  - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- 6) Bidang Kebudayaan membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Budaya; dan
  - b. Seksi Cagar Budaya

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



### 2.1. Permasalahan Organisasi

Upaya pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan terus dilakukan namun masih ada beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Masih kurangnya tenaga pendidik terutama untuk jenjang SD sederajat
- b. Peraturan baru bahwa dihapusnya UPT sehingga kabupaten kesulitan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan dengan jenjang SD dan TK yang mana jumlah SD sebanyak 501 sekolah dan TK/RA sejumlah 901 lembaga.
- c. Belum ada tenaga administrasi pada jenjang SD sehingga pengelolaan administrasi sekolah SD belum optimal karena diampu oleh pendidik/guru.

- d. Adanya kebijakan-kebijakan baru yang harus dilaksanakan dengan sifatnya mendadak dan kebijakan tersebut sebenarnya belum siap, hal ini sangat menjadikan kesulitan dalam pengimplementasian.

### 3. Sumber Daya

#### 3.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 41 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Badan (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang (Eselon III.a dan III.b) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 3 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 orang Kepala Seksi.
2. Kepala Sub Bagian maupun kepala Seksi dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.1**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	29	10	19
2	S1	31	17	14
3	DIII	3	2	1

4	SLTA	12	7	5
5	SLTP	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>36</b>	<b>39</b>

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

**Tabel 2.2**

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	5	4	1
3	III	29	14	15
4	IV	8	8	-
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>24</b>	<b>15</b>

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

**Tabel 2.3**

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	-	-	-
2	Diklatpim II	-	-	-
3	Diklatpim III	6	6	-
4	Diklatpim IV	11	9	2
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

#### 4.1. Sumber Daya Modal

**Tabel 2.4**

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4

1	Meja Tamu	5	Baik
2	Kursi Tamu	9	Baik
3	Meja Tulis / kerja	58	Baik
4	Kursi kerja	73	Baik
5	Filling Cabinet	23	Baik
6	Computer	26	Baik
7	Mesin Ketik	4	Baik
8	Kipas Angin	3	Baik
9	Dispenser	5	Baik
10	Almari Kaca	17	Baik
11	Almari Kayu	10	Baik
12	Almari file	11	Baik
13	Rak Tata Naskah / rak besi	24	Baik
14	Meja Rapat	10	Baik
15	Kursi Tunggu	2	Baik
16	TV Berwarna	4	Baik
17	Kursi pejabat/Putar	25	Baik
18	Kursi Rapat	45	Baik
19	Papan Pengumuman	2	Baik
20	Brankas	4	Baik
21	Kendaraan Roda 4	5	Baik
22	AC	11	Baik
23	Peta Kabupaten Karanganyar	1	Baik
24	Meja Kecil	2	Baik
25	Jam Dinding	4	Baik
26	Wireless	2	Baik
27	Emergency Lamp	1	Baik
28	Penghancur Kertas	1	Baik
29	Vacum Clener	1	Baik
30	Buku Perpustakaan	33	Rusak 6
31	UPS	5	Baik
32	Printer Computer	33	Baik
33	Laptop/Notebook	16	Baik
34	Meja Komputer	24	Baik

35	Gambar Presiden/Wapres	1	Baik
36	Gambar Bupati/Wakil Bupati	1	Baik
37	Peti Uang	2	Baik
38	Kulkas	1	Baik
39	Mesin Ketik Elektrik	3	Baik
40	LCD	9	Rusak 5
41	Server	2	Rusak
42	Jaringan/Unit	3	Baik
43	Handycam	1	Rusak
44	Kendaraan Roda Dua	20	Baik
45	Camera Digital	4	Baik

### A. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi pendidikan dan identifikasi permasalahan pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Karanganyar disusun untuk pembenahan dan dipertahankan. Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat, pada tahun 2021 sebesar 75,86; usia harapan hidup sebesar 77,47 tahun; harapan lama sekolah sebesar 13,68 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,56 tahun. Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi :

Belum optimalnya pemerataan, mutu dan akses pendidikan, hal ini dapat dilihat dari capaian urusan pendidikan tahun 2021. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana PNF dimana pada tahun 2021 baru mencapai 73%. Masih rendahnya anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini dimana pada tahun 2021 baru mencapai 52%. Hal ini berarti belum semua penduduk mendapat pelayanan pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2019.

- 1) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana PNF

- dimana pada tahun 2021 baru mencapai 73%
- 2) Masih rendahnya anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini dimana pada tahun 2021 baru mencapai 52%. Dan masih kurangnya pencapaian SPM pada pelayanan PAUD usia 5-6 tahun.
  - 3) Belum optimalnya tingkat partisipasi anak sekolah dasar dan kesetaraan dalam pencapaian Harapan Lama Sekolah (tahun 2021 sebesar 13,68 tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun 2021 sebesar 9,20 tahun) sebagaimana dalam SPM bidang pendidikan.
  - 4) Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya, tahun 2021 sebesar 81,10%;
  - 5) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya.

## **B. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV Penutup.**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

---

### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator tujuan dan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana teruang dalam Tabel 2.1 .

Berikut lampiran target kinerja tahun 2021 yang dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Pada dasarnya realisasi sudah mencapai diatas target yang terdapat pada RPJMD, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk beberapa macam indikator.

NO	Indikator Utama	2021	
		target	Capaian
1	Angka Harapan lama Sekolah	13,0	13.69
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	8,0	8.57

## II.2. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah menyusun renstra dimana renstra ini setiap tahun digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan acuan bagi penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) organisasi pemerintah daerah (OPD).

Renstra ini berlaku selama 5 tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi bupati yang dijabarkan ke dalam tahapan dan sasaran sebagai berikut:

Program dalam Misi Bupati nomor 3 yaitu Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis.

Program Unggulan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung misi Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis, dengan menentukan indikator sasaran sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	
				target	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka partisipasi sekolah	95,05	98,51
2			Angka putus sekolah SD/MI	0,24	0,01
3			Angka putus sekolah SMP/MTs	0,34	0,08
4			Angka melanjutkan	95,05	99,51
5			Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	79	81,54

6			Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	82	86,87
7	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya	87,7	100
8			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan	13,15	88,98
9	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	55	58.48
10			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	84.75

dengan fokus pada : kualitas **SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan mengguggulkan kearifan lokal**. Tantangan yang harus ditaklukan adalah pembuktian daya kreasi dan inovasi masyarakat. **Pembangunan masyarakat pembelajar (*learning society*)** menjadi isu strategis untuk mendukung terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan mengguggulkan kearifan lokal. Isu ini menjawab tantangan isu nasional implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 2017 berkaitan dengan Strategi Pemajuan Budaya Indonesia mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Tujuan dari Pemajuan Kebudayaan adalah: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa; (g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional

Program pembangunan urusan pendidikan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- 3) Program Pendidikan Non Formal;
- 4) Program Pembinaan Kependidikan dan Kesiswaan

- 5) Program Keragaman Kekayaan Budaya
- 6) Program Kekayaan Nilai Budaya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Tujuan, Sasaran yang harus dicapai yaitu :

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan:

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

Indikator Sasaran:

- 1) Angka Harapan lama Sekolah
  - 2) Angka Rata-rata lama Sekolah
  - 3) Angka partisipasi sekolah
  - 4) Angka putus sekolah SD/MI
  - 5) Angka putus sekolah SMP/MTs
  - 6) Angka melanjutkan
  - 7) Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik
  - 8) Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik
2. Tujuan : Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan  
Sasaran : Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan  
Indikator Sasaran  
    - 1) Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya
    - 2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan
  3. Tujuan : Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas  
Sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.  
Indikator sasaran:  
    - 1) Nilai SAKIP
    - 2) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

### II.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang menerima amanah atau tanggungjawab kerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab kerja. Dengan demikian perjanjian kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari perjanjian kinerja bagi pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian

kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2021 sebagaimana terlampir.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**III.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Berdasarkan kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2021, dapat disajikan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, meliputi Indikator Kinerja, Capaian Kinerja, Aspek Keuangan evaluasi kinerja dan Strategi Pemecahan Masalah

Capaian kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi seluruh program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

**1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA**

Capaian realisasi indikator kinerja kunci Dinas pendidikan dan kebudayaan Tahun 2021 dapat dilihat pada table tersebut dibawah ini.

NO	Indikator Utama	Realisasi 2020	2021		
			target	realisasi	capaian
1	4	5	6	7	8
1	Angka Harapan lama Sekolah	13,74	13,81	13,69	99,13
2	Angka Rata-rata lama Sekolah	9,20	8,66	8,57	98,96
3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	88,80	88,50	100	112,99
4	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	87,80	13,45	88,98	661,56

Sedangkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	
			target	realisasi
1	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka partisipasi sekolah	95,15	98,57
2		Angka putus sekolah SD/MI	0,11	0,01
3		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,20	0,08
4		Angka melanjutkan	95,15	99,59
5		Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	80	81,45

6		Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	82	86,47
7	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	88,50	100
8		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	13,45	88,98
9	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	60	78,60
10		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85.67

Pada pilar ketersediaan dapat dilihat dari pencapaian indikator telah melebihi target yang ditentukan pada tahun ke dua (2) Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada bidang Pendidikan. Dari tahun ke tahun diperoleh capaian yang selalu meningkat dan selalu di atas target yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan pada pencapaian indikator bidang pendidikan sudah ini **sangat berhasil**.

## 2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021		
				target	realisasi	capaian
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah	13,74	13,72	13,69	99,78
2		Angka Rata-rata lama Sekolah	9,2	8,65	8,57	99,08
3		Angka partisipasi sekolah	98,57	95,05	98,57	103,70
4		Angka putus sekolah SD/MI	0,01	0,24	0,01	2400,00
5		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,14	0,34	0,08	425,00
6		Angka melanjutkan	98,57	95,05	99,59	104,78
7		Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	80,05	79	81,45	103,10
8		Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	86,47	80	86,47	108,09
9	Meningkatnya pelestarian dan	Persentase benda, situs dan kawasan	88,80	88,10	100	113,51

	pengelolaan kebudayaan	cagar budaya yang dilestarikan				
10		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	87,80	13,30	88,98	669,02
11	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	70,14	59	78,18	142,91
12		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.85	80	85.67	107,09

Pada tahun 2021 merupakan pijakan awal tahun penyusunan Review Rencana Strategis sehingga merumuskan indikator-indikator baru untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Program Pemerintah Daerah yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menambah Indek Pembangunan manusia di Kabupaten Karanganyar semakin tinggi, yang mana pada tahun 2021 merupakan tahun kedua melaksanakan pemerintahan dengan Kepala Daerah yang baru.

Pada pencapaian indikator Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2021 mencapai 13,69, meningkat 0,05% dibanding tahun 2020 sebesar 13,74%. Angka pada tahun ini turun sekitar 0,05% dikarenakan adanya pandemic covid selama 2 tahun lebih mengakibatkan angka tersebut cenderung turun, namun setelah diamati dengan angka putus sekolah jenjang SD dan SMP yang cenderung turun, sehingga yang mengakibatkan turun pada kemungkinan siswa jenjang di atasnya, yaitu SMA/SMK atau Perguruan Tinggi. Begitu juga dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 8,57 tahun meningkat sebesar 0,08% dibanding pada tahun 2020 yang mencapai sebesar 8,49. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2021 mencapai 98,57%. Sedangkan Angka Putus Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2021 mencapai 0,01, terjadi penurunan 0,01% dibanding tahun 2020 mencapai 0,02%, sedangkan angka putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ) terjadi penurunan 0,10% dibanding tahun 2020 mencapai 0,14%, pada tahun 2021 sebesar 0,04, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2021 mencapai 98,57%, terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar 95,51%. Sedangkan ruang kelas yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD/MI pada tahun 2020 mencapai 79,65%, mengalami peningkatan sebesar 9,10% dibanding pada tahun 2021 yang mencapai 81,45%, untuk ruang kelas pada jenjang SMP/MTs yang sesuai Standar Nasional Pendidikan pada tahun



2021 mencapai 86,47%, mengalami peningkatan sebesar 0,31% dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 86,16%,

Mengenai Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 mencapai 100, mengalami peningkatan sebesar 11,20 dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 88,80, sedangkan Persentase kelompok seni budaya yang aktif pada tahun 2021 mencapai 88,98% meningkat 1,18% dibandingkan dengan tahun 2020 baru mencapai 87,80%, namun meningkat tajam dari target yang sebesar 13,30% sehingga capaiannya 669,02%.

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 mendapat nilai sebesar 78,18 meningkat 7,88 point dibanding tahun 2020 mendapatkan nilai 70,30. Untuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 mendapatkan nilai 85,67 meningkat 0,82% dibandingkan pada tahun 2020 mendapatkan nilai 84,85%.

Kebijakan pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk : (a) Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja; (b) Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya; (c) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; (d) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai adalah (a) meningkatnya kualitas pendidikan; (b) meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan; (c) meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas;.

### 3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS.

Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Data Capaian pada Tahun 2021
	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program		2021	2021	2021	2022	2023	
	( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )		target	target	target	target	target	
2	5	6	7	9	11	13	15	17
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Angka Harapan lama Sekolah	13,64	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13.66
	2. Angka Rata-	8,35	8,0	8,15	8,17	8,20	8,8,25	8.49

	rata lama Sekolah							
	1) Angka partisipasi sekolah	95	95,05	95,1	95,15	95,2	95,25	98,51
	2) Angka putus sekolah							
	SD/MI	0,31	0,24	0,18	0,11		0,03	0,01
	SMP/MTs	0,41	0,34	0,25	0,2		0,16	0,08
	3) Angka melanjutkan	95	95,05	95,1	95,15		95,25	98,51
	4) Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik							
	SD/MI	78	79	79,5	80	81	82	79,65
	SMP/MTs	79	80	81	82	83	85	86,16
Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	87,63	87,7	88,1	88,5		90	88,80
	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	13	13,15	13,3	13,45	13,55	13,75	87,80
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	56	57	58	59	60	62	58
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,60						84.75

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Analisis Permasalahan
					target	realisasi	capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan lama Sekolah	13.74	13,0	13,69	105,07,	Adanya pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP dapat meningkatkan minat dan harapan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sehingga dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Hal ini perlu didukung sarana prasarana pendidikan yang memadai, walaupun capaian sudah melebihi 100% dari realisasi yang diperoleh namun masih jauh dibawah Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan.
2			Angka Rata-rata lama Sekolah	9,2	8,0	8,57	106,12	
3			Angka partisipasi sekolah	98,57	95,05	98,57	103,64	
4			Angka putus sekolah SD/MI	0,01	0,24	0,01	2.40	
5			Angka putus sekolah SMP/MTs	0,14	0,34	0,08	41,18	
6			Angka melanjutkan	98,57	95,05	99,59	103,64	
7			Persentase fasilitas pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	80,05	79	81,45	100,81	
8			Persentase fasilitas pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	86,47	80	86,47	107,70	

9	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Meningkatkannya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	88,97	87,7	100	101,25	Minat dan antusias warga masyarakat terhadap festival seni, budaya, serta benda cagar budaya untuk melestarikannya sangat tinggi dan melestarikan cagar budaya daerah.
10			Persentase kelompok seni budaya yang aktif	89,80	13,15	88,98	667,68	
11			Nilai SAKIP	70,14	55	78,18	105,45	Sistim akuntabilitas Instansi Pemerintahan di Dinas Kabupaten Karanganyar sudah meningkat dari tahun ke tahun hal ini disebabkan pimpinan menerapkan komitmen-komitmen terhadap peraturan yang di berikan dan juga anggaran yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga dapat memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dengan baik dibuktikan indek kepuasan masyarakat nilainya juga meningkat, artinya Masyarakat kebanyakan puas dengan pelayanan yang diberikan
12	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.85	80	85.67	105,93	

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Uraian Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>URUSAN WAJIB</b>									
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>847.765.400,00</b>	<b>842.843.000,00</b>	<b>100</b>	<b>4.922.400,00</b>	<b>0,58</b>	<b>99,42</b>	<b>72</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246.425.000,00	243.687.600,00	100	2.737.400,00	1,11	98,89	5 dok	ef & ev
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	178.925.000,00	178.290.000,00	100	635.000,00	0,35	99,65	178 keg	ef & ev
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.270.000,00	39.129.800,00	100	1.140.200,00	2,83	97,17	178 keg	ef & ev
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.395.000,00	22.395.000,00	100	0,00	0,00	100,00	178 keg	ef & ev
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.412.800,00	13.377.800,00	100	35.000,00	0,26	99,74	178 keg	ef & ev
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	182.487.600,00	182.407.800,00	100	79.800,00	0,04	99,96	8 lap	ef & ev
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.850.000,00	163.555.000,00	100	295.000,00	0,18	99,82	178 keg	ef & ev
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>584.551.095.000,00</b>	<b>570.984.266.654,00</b>	<b>100</b>	<b>13.566.828.346,00</b>	<b>2,32</b>	<b>97,68</b>	<b>5</b>	<b>ef &amp; ev</b>

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	584.229.584.000,00	570.669.335.445,00	100	13.560.248.555,00	2,32	97,68	1 tahun	ef & ev
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.960.000,00	38.800.000,00	100	160.000,00	0,41	99,59	100	ef & ev
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.000.000,00	74.941.709,00	100	58.291,00	0,08	99,92	80	ef & ev
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000,00	24.990.000,00	100	10.000,00	0,04	99,96	100	ef & ev
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.910.000,00	100	90.000,00	0,60	99,40	5	ef & ev
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00	9.980.000,00	100	20.000,00	0,20	99,80	5	ef & ev
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	151.511.000,00	145.349.500,00	100	6.161.500,00	4,07	95,93	5	ef & ev
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.040.000,00	5.960.000,00	100	80.000,00	1,32	98,68	8	ef & ev
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>134.507.500,00</b>	<b>100</b>	<b>492.500,00</b>	<b>0,36</b>	<b>99,64</b>	<b>85</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	11.430.000,00	11.265.000,00	100	165.000,00	1,44	98,56	85	ef & ev
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	54.000.000,00	53.942.500,00	100	57.500,00	0,11	99,89	85	ef & ev

3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.570.000,00	44.450.000,00	100	120.000,00	0,27	99,73	85	ef & ev
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	24.850.000,00	100	150.000,00	0,60	99,40	85	ef & ev
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>290.058.800,00</b>	<b>100</b>	<b>9.941.200,00</b>	<b>3,31</b>	<b>96,69</b>	<b>5</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	250.000.000,00	241.200.000,00	100	8.800.000,00	3,52	96,48	100	ef & ev
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	48.858.800,00	100	1.141.200,00	2,28	97,72	1 kegiatan	ef & ev
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.599.377.800,00</b>	<b>1.570.634.444,00</b>	<b>100</b>	<b>28.743.356,00</b>	<b>1,80</b>	<b>98,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.001.000,00	59.790.000,00	100	211.000,00	0,35	99,65	85,00%	ef & ev
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	103.018.750,00	101.145.450,00	100	1.873.300,00	1,82	98,18	80	ef & ev
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.130.000,00	218.081.000,00	100	49.000,00	0,02	99,98	12 bulan	ef & ev
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.402.100,00	104.661.550,00	100	2.740.550,00	2,55	97,45	12 bulan	ef & ev
5	Penyediaan Bahan/Material	275.184.050,00	273.888.000,00	100	1.296.050,00	0,47	99,53	12 bulan	ef & ev
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	100	0,00	0,00	100,00	200 tamu	ef & ev
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	524.970.000,00	522.843.544,00	100	2.126.456,00	0,41	99,59	85	ef & ev

8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	78.671.900,00	76.334.900,00	100	2.337.000,00	2,97	97,03	85	ef & ev
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	217.000.000,00	198.890.000,00	100	18.110.000,00	8,35	91,65	85%	ef & ev
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.506.312.500,00</b>	<b>597.869.680,00</b>	<b>101</b>	<b>908.442.820,00</b>	<b>60,31</b>	<b>39,69</b>	<b>100%</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	501.212.500,00	489.910.000,00	100	11.302.500,00	2,26	97,74	80%	ef & ev
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	916.300.000,00	19.259.680,00	101	897.040.320,00	97,90	2,10	75%	ef & ev
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.800.000,00	88.700.000,00	100	100.000,00	0,11	99,89	80%	ef & ev
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.148.800,00	367.943.207,00	100	43.205.593,00	10,51	89,49	100%	ef & ev
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.749.800,00	5.319.800,00	100	2.430.000,00	31,36	68,64	100%	ef & ev
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.399.000,00	362.623.407,00	100	40.775.593,00	10,11	89,89	100%	ef & ev
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>594.763.400,00</b>	<b>592.520.350,00</b>	<b>100</b>	<b>2.243.050,00</b>	<b>0,38</b>	<b>99,62</b>	<b>100%</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.532.400,00	228.361.900,00	100	2.170.500,00	0,94	99,06	80%	ef & ev



2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.231.000,00	100.186.200,00	100	44.800,00	0,04	99,96	80%	ef & ev
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	264.000.000,00	263.972.250,00	100	27.750,00	0,01	99,99	80%	ef & ev
<b>IX</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>94.219.012.680,00</b>	<b>89.250.795.175,00</b>	<b>100</b>	<b>4.968.217.505,00</b>	<b>5,27</b>	<b>94,73</b>	<b>100%</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.474.090.000,00	1.370.224.500,00	100	103.865.500,00	7,05	92,95	7 ruang	ef & ev
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	243.924.000,00	240.485.200,00	100	3.438.800,00	1,41	98,59	3 ruang	ef & ev
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	817.840.000,00	810.710.500,00	100	7.129.500,00	0,87	99,13	4 ruang	ef & ev
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.270.000.000,00	1.261.684.000,00	100	8.316.000,00	0,65	99,35	8 ruang	ef & ev
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.554.705.000,00	3.523.056.200,00	100	31.648.800,00	0,89	99,11	25 ruang	ef & ev
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	244.025.000,00	241.966.000,00	100	2.059.000,00	0,84	99,16	5 ruang	ef & ev
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	447.830.000,00	442.073.000,00	100	5.757.000,00	1,29	98,71	5 ruang	ef & ev
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	462.882.000,00	458.884.000,00	100	3.998.000,00	0,86	99,14	10 ruang	ef & ev
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	56.609.987.000,00	54.548.079.315,00	100	2.061.907.685,00	3,64	96,36	100%	ef & ev
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.590.000.000,00	2.541.137.600,00	100	48.862.400,00	1,89	98,11	8 paket%	ef & ev
11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	167.078.600,00	163.771.600,00	100	3.307.000,00	1,98	98,02	85%	ef & ev

12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	555.674.000,00	523.977.800,00	100	31.696.200,00	5,70	94,30	17 kecamatan	ef & ev
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.307.826.400,00	244.331.400,00	101	1.063.495.000,00	81,32	18,68	45%	ef & ev
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24.165.355.680,00	22.573.345.060,00	100	1.592.010.620,00	6,59	93,41	80%	ef & ev
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00	149.955.000,00	100	45.000,00	0,03	99,97	51 sekolah	ef & ev
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	157.795.000,00	157.114.000,00	100	681.000,00	0,43	99,57	100%	ef & ev
<b>X</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>42.800.074.920,00</b>	<b>41.714.363.136,00</b>	<b>100</b>	<b>1.085.711.784,00</b>	<b>2,54</b>	<b>97,46</b>	<b>100%</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	950.000.000,00	948.704.000,00	100	1.296.000,00	0,14	99,86	7 ruang	ef & ev
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	480.000.000,00	478.215.500,00	100	1.784.500,00	0,37	99,63	2 ruang	ef & ev
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	951.987.500,00	947.707.500,00	100	4.280.000,00	0,45	99,55	5 ruang	ef & ev
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	151.500.000,00	150.043.000,00	100	1.457.000,00	0,96	99,04	1 ruang	ef & ev
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	42.000.000,00	40.840.000,00	100	1.160.000,00	2,76	97,24	1 ruang	ef & ev
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	32.334.463.000,00	32.011.412.636,00	100	323.050.364,00	1,00	99,00	100%	ef & ev
7	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	1.529.820.000,00	1.516.089.000,00	100	13.731.000,00	0,90	99,10	8 paket	ef & ev

8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	515.524.000,00	506.998.200,00	100	8.525.800,00	1,65	98,35	85%	ef & ev
9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	229.332.500,00	201.071.700,00	100	28.260.800,00	12,32	87,68	51 sekolah	ef & ev
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	649.800.000,00	190.170.000,00	101	459.630.000,00	70,73	29,27	20 kejuaraan	ef & ev
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.812.392.920,00	4.570.251.900,00	100	242.141.020,00	5,03	94,97	86%	ef & ev
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	49.806.800,00	100	193.200,00	0,39	99,61	75%	ef & ev
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	103.255.000,00	103.052.900,00	100	202.100,00	0,20	99,80	90%	ef & ev
<b>XI</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>21.757.722.500,00</b>	<b>19.886.981.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.870.741.500,00</b>	<b>8,60</b>	<b>91,40</b>	<b>100%</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100	0,00	0,00	100,00	70%	ef & ev
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	455.000.000,00	455.000.000,00	100	0,00	0,00	100,00	70%	ef & ev
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	125.000.000,00	125.000.000,00	100	0,00	0,00	100,00	70%	ef & ev
4	Pengadaan Mebel PAUD	200.000.000,00	199.800.000,00	100	200.000,00	0,10	99,90	200 unit	ef & ev
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	ef & ev

6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000,00	99.850.000,00	100	150.000,00	0,15	99,85	20 unit	ef & ev
7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	281.000.000,00	280.628.000,00	100	372.000,00	0,13	99,87	75%	ef & ev
8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	90.800.000,00	90.000.000,00	100	800.000,00	0,88	99,12	75%	ef & ev
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.632.322.500,00	1.630.497.000,00	100	1.825.500,00	0,11	99,89	60%	ef & ev
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	185.200.000,00	184.406.000,00	100	794.000,00	0,43	99,57	6 lembaga	ef & ev
11	Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.588.400.000,00	15.721.800.000,00	100	1.866.600.000,00	10,61	89,39	80%	ef & ev
<b>XII</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>8.932.100.000,00</b>	<b>8.927.593.500,00</b>	<b>100</b>	<b>4.506.500,00</b>	<b>0,05</b>	<b>99,95</b>	<b>100%</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	100	0,00	0,00	100,00	1 paket	ef & ev
2	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	198.750.000,00	100	1.250.000,00	0,62	99,38	60%	ef & ev
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	90%	ef & ev
4	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	405.000.000,00	404.296.000,00	100	704.000,00	0,17	99,83	45%	ef & ev
5	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan	30.000.000,00	29.760.000,00	100	240.000,00	0,80	99,20	60%	ef & ev

	Nonformal/Kesetaraan								
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.195.000.000,00	3.192.762.500,00	100	2.237.500,00	0,07	99,93	2 kegiatan	ef & ev
7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.102.100.000,00	5.102.025.000,00	100	75.000,00	0,00	100,00	25 Dikmas	ef & ev
<b>XII</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>246.572.500,00</b>	<b>100</b>	<b>3.427.500,00</b>	<b>1,37</b>	<b>98,63</b>	<b>80</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	250.000.000,00	246.572.500,00	100	3.427.500,00	1,37	98,63	35 sekolah	ef & ev
<b>XIII</b>	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>15.420.000,00</b>	<b>15.370.000,00</b>	<b>100</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>99,68</b>	<b>70</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.420.000,00	15.370.000,00	100	50.000,00	0,32	99,68	3 sekolah	ef & ev
<b>XIV</b>	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>44.800.000,00</b>	<b>43.780.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>2,28</b>	<b>97,72</b>	<b>70</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	44.800.000,00	43.780.000,00	100	1.020.000,00	2,28	97,72	25 lembaga	ef & ev

	Masyarakat								
<b>XV</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>354.046.000,00</b>	<b>352.673.900,00</b>	<b>100</b>	<b>1.372.100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>99,61</b>	<b>80</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	100	0,00	0,00	100,00	75	ef & ev
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	304.046.000,00	302.673.900,00	100	1.372.100,00	0,45	99,55	80	ef & ev
<b>XVI</b>	<b>Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.778.574.200,00</b>	<b>1.776.462.200,00</b>	<b>100</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>99,88</b>	<b>80</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.778.574.200,00	1.776.462.200,00	100	2.112.000,00	0,12	99,88	25 kesenian	ef & ev
<b>XVI I</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>157.250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>99,02</b>	<b>80</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	100.000.000,00	99.620.000,00	100	380.000,00	0,38	99,62	50 Seni	ef & ev

2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	58.800.000,00	57.630.000,00	100	1.170.000,00	1,99	98,01	120 Festival	ef & ev
<b>XVI II</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>242.356.300,00</b>	<b>242.236.300,00</b>	<b>100</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>99,95</b>	<b>80</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	242.356.300,00	242.236.300,00	100	120.000,00	0,05	99,95	80	ef & ev
<b>XIX</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>75.208.500,00</b>	<b>75.074.400,00</b>	<b>100</b>	<b>134.100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>99,82</b>	<b>80</b>	<b>ef &amp; ev</b>
1	Penetapan Cagar Budaya	75.208.500,00	75.074.400,00	100	134.100,00	0,18	99,82	75	ef & ev
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	760.633.578.000,00	738.129.795.746,00	100	22.503.782.254,00	2,96	97,04		





## 7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dari kegiatan atau daya serap keuangan tersebut dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 97,13% dari anggaran Rp. 760.633.578.000,- terealisasi Rp. 738.824.197.469,- tidak terealisasi Rp. 22.503.782.254,-.

Dari pagu dan capaian kinerja SPKD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dihitung berdasarkan seluruh capaian kinerja sebesar 97,13% capaian kinerja tersebut berada pada rentang 85 - 100 dengan interpretasi "**Sangat Berhasil**"



### III.2. Realisasi Anggaran

#### 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN APBD KABUPATEN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi	% KEU	JUMLAH SISA ANGGARAN
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
1	Gaji Pokok ASN	297.024.327.586,00	293.602.793.254,00	98,85%	3.421.534.332,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	26.085.711.536,00	25.652.473.926,00	98,34%	433.237.610,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	300.710.000,00	248.310.000,00	82,57%	52.400.000,00
4	Tunjangan Fungsional ASN	23.814.886.000,00	23.440.843.000,00	98,43%	374.043.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.550.950.000,00	2.540.349.000,00	99,58%	10.601.000,00
6	Tunjangan Beras ASN	13.561.385.098,00	12.358.971.940,00	91,13%	1.202.413.158,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.621.363.595,00	1.913.469.228,00	73,00%	707.894.367,00
8	Pembulatan Gaji ASN	4.236.916,00	3.799.373,00	89,67%	437.543,00
9	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	19.771.330.460,00	19.627.093.300,00	99,27%	144.237.160,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	3.209.999.809,00	2.411.458.450,00	75,12%	798.541.359,00
11	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	194.389.149.000,00	194.291.268.940,00	99,95%	97.880.060,00
12	Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Tunjangan Penghasilan Guru	1.022.260.000,00	519.000.000,00	50,77%	503.260.000,00
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	24.510.648.000,00	23.760.696.178,00	96,94%	749.951.822,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	608.866.958.000,00	600.370.526.589,00	98,60%	8.496.431.411,00
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.787.493.700,00	1.554.914.860,00	86,99%	232.578.840,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12.500.000,00	12.473.000,00	99,78%	27.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	433.398.700,00	359.354.779,00	82,92%	74.043.921,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	68.360.000,00	67.651.725,00	98,96%	708.275,00

	dinas/operasional				
4	Penyediaan alat tulis kantor	268.000.000,00	266.130.500,00	99,30%	1.869.500,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	159.985.000,00	155.985.750,00	97,50%	3.999.250,00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100%	0,00
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	122.000.000,00	121.225.800,00	99,37%	774.200,00
8	Penyediaan makanan dan minuman	246.000.000,00	236.956.625,00	96,32%	9.043.375,00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	437.250.000,00	295.136.681,00	67,50%	142.113.319,00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.928.011.000,00	1.921.157.768,00	99,64%	6.853.232,00
10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.000.000,00	198.485.000,00	99,24%	1.515.000,00
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	990.575.000,00	985.595.000,00	99,50%	4.980.000,00
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	488.640.000,00	488.428.000,00	99,96%	212.000,00
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	119.796.000,00	119.649.768,00	99,88%	146.232,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	74.000.000,00	74.000.000,00	100%	0,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	100%	0,00
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	160.000.000,00	159.000.000,00	99,38%	1.000.000,00
16	Peningkatan SDM	160.000.000,00	159.000.000,00	99,38%	1.000.000,00
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	309.711.000,00	305.456.000,00	98,63%	4.255.000,00
17	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	125.000.000,00	120.890.000,00	96,71%	4.110.000,00
18	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja	114.511.000,00	114.511.000,00	100%	0,00
19	Penyusunan Dokumen Laporan BMN/Aset	70.200.000,00	70.055.000,00	99,79%	145.000,00
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.350.710.000,00	1.342.178.600,00	99,37%	8.531.400,00
20	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (APBD)	226.000.000,00	225.680.000,00	99,86%	320.000,00
21	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (APBN)	138.600.000,00	135.300.000,00	97,62%	3.300.000,00
22	Penyediaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas	986.110.000,00	981.198.600,00	99,50%	4.911.400,00

	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	110.073.989.020,00	102.694.109.236,00	93,30%	7.379.879.784,00
23	Sosialisasi Informasi Pendidikan Dasar Jenjang SD	352.240.000,00	350.190.000,00	99,42%	2.050.000,00
24	Sosialisasi Informasi Pendidikan Dasar Jenjang SMP	182.360.500,00	181.895.500,00	99,75%	465.000,00
25	Pembinaan Potensi Akademis Siswa Jenjang SD	397.997.200,00	394.252.400,00	99,06%	3.744.800,00
26	Pembinaan Potensi Akademis Siswa Jenjang SMP	485.139.500,00	483.244.500,00	99,61%	1.895.000,00
27	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (APBD)	4.127.375.000,00	4.085.126.000,00	98,98%	42.249.000,00
28	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (Program DAK)	11.463.328.000,00	10.976.559.700,00	95,75%	486.768.300,00
29	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD Negeri	57.153.010.941,00	53.929.566.209,00	94,36%	3.223.444.732,00
30	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SMP Negeri	30.360.110.879,00	26.798.731.787,00	88,27%	3.561.379.092,00
31	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (Bankeu Provinsi)	140.000.000,00	139.068.000,00	99,33%	932.000,00
32	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (APBD)	2.788.250.000,00	2.756.518.240,00	98,86%	31.731.760,00
33	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (Program DAK)	2.624.177.000,00	2.598.956.900,00	99,04%	25.220.100,00
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	3.261.708.000,00	3.245.757.000,00	99,51%	15.951.000,00
34	Penyelenggaraan kegiatan Non Formal (APBD)	1.527.982.000,00	1.522.582.000,00	99,65%	5.400.000,00
35	Penyediaan sarpras Dikmas	984.126.000,00	973.621.000,00	98,93%	10.505.000,00
36	Penyelenggaraan kegiatan Non Formal (APBN)	749.600.000,00	749.554.000,00	99,99%	46.000,00
	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	877.254.280,00	858.626.849,00	97,88%	18.627.431,00
37	Manajemen Pendataan Pendidikan (APBD Provinsi)	70.000.000,00	70.000.000,00	100%	-
38	Penyusunan Laporan Bidang Pendidikan	70.570.000,00	68.755.000,00	97,43%	1.815.000,00
39	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penerapan Sistem	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92%	25.000,00
40	Informasi Manajemen Pendidikan	665.725.280,00	649.162.849,00	97,51%	16.562.431,00
41	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	110.959.000,00	110.734.000,00	99,80%	225.000,00

	<b>Program Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan</b>	29.466.301.000,00	29.029.533.680,00	98,52%	436.767.320,00
42	Pengembangan Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik PAUD dan Dikmas	91.500.000,00	90.100.000,00	98,47%	1.400.000,00
43	Pengembangan Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik SD dan SMP	27.975.209.500,00	27.547.668.680,00	98,47%	427.540.820,00
44	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kompetensi	1.235.500.000,00	1.235.400.000,00	99,99%	100.000,00
45	Pembinaan Bakat Minat dan Kompetensi Siswa Jengjang SD	86.820.000,00	80.265.000,00	92,45%	6.555.000,00
46	Pembinaan Bakat Minat dan Kompetensi Siswa Jengjang SMP	77.271.500,00	76.100.000,00	98,48%	1.171.500,00
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	22.319.600.000,00	21.854.050.970,00	97,91%	465.549.030,00
47	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Karanganyar)	1.204.400.000,00	1.178.900.000,00	97,88%	25.500.000,00
48	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Tasikmadu)	903.000.000,00	869.842.500,00	96,33%	33.157.500,00
49	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Jaten)	1.104.000.000,00	1.074.800.000,00	97,36%	29.200.000,00
50	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Kebakkramat)	1.013.600.000,00	981.100.000,00	96,79%	32.500.000,00
51	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Mojogedang)	1.003.200.000,00	969.700.000,00	96,66%	33.500.000,00
52	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Karangpandan)	682.800.000,00	668.900.000,00	97,96%	13.900.000,00
53	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Matesih)	627.000.000,00	614.400.000,00	97,99%	12.600.000,00
54	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Tawangmangu)	675.000.000,00	661.000.000,00	97,93%	14.000.000,00
55	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Ngargoyoso)	428.800.000,00	419.100.000,00	97,74%	9.700.000,00
56	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Jenawi)	413.000.000,00	402.300.000,00	97,41%	10.700.000,00

57	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Kerjo)	584.400.000,00	565.860.000,00	96,83%	18.540.000,00
58	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Colomadu)	641.400.000,00	624.200.000,00	97,32%	17.200.000,00
59	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Gondangrejo)	638.400.000,00	614.300.000,00	96,22%	24.100.000,00
60	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Jumapolo)	428.400.000,00	414.600.000,00	96,78%	13.800.000,00
61	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Jatipuro)	427.400.000,00	410.725.000,00	96,10%	16.675.000,00
62	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Jumantono)	646.600.000,00	624.700.000,00	96,61%	21.900.000,00
63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri (UPT Jatiyoso)	477.400.000,00	463.100.000,00	97,00%	14.300.000,00
64	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Karanganyar)	339.200.000,00	338.674.000,00	99,84%	526.000,00
65	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Karanganyar)	330.800.000,00	330.800.000,00	100%	0,00
66	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Karanganyar)	344.400.000,00	342.927.000,00	99,57%	1.473.000,00
67	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 4 Karanganyar)	300.400.000,00	299.800.000,00	99,80%	600.000,00
68	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 5 Karanganyar)	305.200.000,00	305.097.500,00	99,97%	102.500,00
69	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Tasikmadu)	307.200.000,00	306.880.000,00	99,90%	320.000,00
70	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Tasikmadu)	262.000.000,00	260.719.000,00	99,51%	1.281.000,00
71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Tasikmadu)	226.800.000,00	225.067.000,00	99,24%	1.733.000,00
72	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Jaten)	308.400.000,00	306.482.000,00	99,38%	1.918.000,00
73	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang	263.200.000,00	263.029.500,00	99,94%	170.500,00

	SMP Negeri (SMPN 2 Jaten)				
74	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Kebakkramat)	229.200.000,00	228.350.000,00	99,63%	850.000,00
75	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Kebakkramat)	268.000.000,00	266.550.000,00	99,46%	1.450.000,00
76	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Kebakkramat)	179.200.000,00	179.200.000,00	100%	0,00
77	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Mojogedang)	268.000.000,00	268.000.000,00	100%	0,00
78	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Mojogedang)	262.800.000,00	262.675.000,00	99,95%	125.000,00
79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Mojogedang)	188.800.000,00	188.800.000,00	100%	0,00
80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Karangpandan)	228.800.000,00	228.800.000,00	100%	0,00
81	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Karangpandan)	227.200.000,00	226.500.000,00	99,69%	700.000,00
82	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Karangpandan)	180.400.000,00	174.710.000,00	96,85%	5.690.000,00
83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Matesih)	271.200.000,00	270.000.000,00	99,56%	1.200.000,00
84	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Matesih)	132.000.000,00	125.800.000,00	95,30%	6.200.000,00
85	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Tawangmangu)	266.800.000,00	266.080.000,00	99,73%	720.000,00
86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Tawangmangu)	143.600.000,00	142.000.000,00	98,89%	1.600.000,00
87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Ngargoyoso)	262.400.000,00	249.155.000,00	94,95%	13.245.000,00
88	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Ngargoyoso)	128.000.000,00	125.800.000,00	98,28%	2.200.000,00
89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Ngargoyoso)	86.800.000,00	84.400.000,00	97,24%	2.400.000,00



90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Jenawi)	153.200.000,00	146.350.000,00	95,53%	6.850.000,00
91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Jenawi)	190.400.000,00	188.225.000,00	98,86%	2.175.000,00
92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Jenawi)	54.000.000,00	53.090.000,00	98,31%	910.000,00
93	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Kerjo)	265.600.000,00	263.140.000,00	99,07%	2.460.000,00
94	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Kerjo)	223.600.000,00	223.200.000,00	99,82%	400.000,00
95	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Kerjo)	30.400.000,00	30.200.000,00	99,34%	200.000,00
96	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Colomadu)	258.000.000,00	244.260.000,00	94,67%	13.740.000,00
97	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Colomadu)	299.600.000,00	298.426.000,00	99,61%	1.174.000,00
98	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Colomadu)	302.400.000,00	300.645.000,00	99,42%	1.755.000,00
99	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Gondangrejo)	229.600.000,00	229.600.000,00	100%	0,00
100	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Gondangrejo)	184.400.000,00	184.250.000,00	99,92%	150.000,00
101	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Gondangrejo)	86.800.000,00	86.800.000,00	100%	0,00
102	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Jumapolo)	293.600.000,00	293.200.000,00	99,86%	400.000,00
103	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Jumapolo)	142.400.000,00	136.100.000,00	95,58%	6.300.000,00
104	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Jumapolo)	54.400.000,00	51.000.000,00	93,75%	3.400.000,00
105	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Jatipuro)	224.800.000,00	223.150.000,00	99,27%	1.650.000,00
106	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang	54.000.000,00	43.200.000,00	80,00%	10.800.000,00

	SMP Negeri (SMPN 2 Jatipuro)				
107	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Jatipuro)	80.400.000,00	73.400.000,00	91,29%	7.000.000,00
108	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Jumantono)	300.400.000,00	299.700.000,00	99,77%	700.000,00
109	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Jumantono)	151.200.000,00	149.916.670,00	99,15%	1.283.330,00
110	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Jumantono)	46.000.000,00	42.570.000,00	92,54%	3.430.000,00
111	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 1 Jatiyoso)	167.600.000,00	161.200.000,00	96,18%	6.400.000,00
112	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 2 Jatiyoso)	118.400.000,00	116.221.800,00	98,16%	2.178.200,00
113	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 3 Jatiyoso)	112.400.000,00	110.270.000,00	98,10%	2.130.000,00
114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri (SMPN 4 Jatiyoso)	86.400.000,00	82.113.000,00	95,04%	4.287.000,00
	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	528.405.000,00	509.024.000,00	96,33%	19.381.000,00
115	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	270.505.000,00	268.144.000,00	99,13%	2.361.000,00
116	Fasilitasi Pengelolaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permusiuman	257.900.000,00	240.880.000,00	93,40%	17.020.000,00
	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	2.879.885.000,00	2.870.350.000,00	99,67%	9.535.000,00
117	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	153.800.000,00	152.700.000,00	99,28%	1.100.000,00
118	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	2.726.085.000,00	2.717.650.000,00	99,69%	8.435.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	175.013.068.000,00	166.414.158.963,00	95,09%	8.598.909.037,00
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG</b>	783.880.026.000,00	766.784.685.552,00	97,82%	17.095.340.448,00



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis . Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reveiw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat berperan selain sebagai bahan masukan (input) dalam proses perencanaan berikutnya, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bapak Bupati dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai.

Sedikit hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Petunjuk pelaksanaan kegiatan yang terlambat karena adanya revisi kegiatan yang memerlukan waktu, sehingga perlu penjadwalan ulang dengan penyesuaian kegiatan yang direvisi;
2. Adanya pandemi covid 19 menjadikan kendala kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. sehingga kegiatan perlu adanya perubahan kegiatan untuk penanganan pandemic covid 19 yang banyak menyedot anggaran;

Hal-hal yang dapat dijadikan catatan penting untuk dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan pencapaian kinerja/outcome, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) melalui berbagai pelatihan, diklat, workshop dan sejenisnya;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama;
3. Pendajwalan kegiatan secara cermat dan prioritas ;
4. Pembentukan tim solid;
5. Sarana kerja yang lengkap;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan, serta bahan evaluasi khususnya yang terkait pendidikan dan kebudayaan.